

KEBERADAAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK DIKETAHUI MENELUSURI FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA PASCA SOEHARTO

Dian Iskandar

Abstract

This paper aims to examine the existence of political parties in Indonesia by looking at the roles and functions carried out by political parties. Data collection method used is study desk. the results are known that the presence of political parties is not felt by the public because the political party has not run the standard functions that diembannya with the maximum and so as to give a tendency of public disappointment against political parties, so that for the political party community is merely a democratic attribute only.

Keywords: existence, political party and function

A. PENDAHULUAN

Awal abad ke 19 merupakan awal fenomena partai politik. Kehadiran partai politik sendiri menjadi isyarat bertransformasinya system politik klasik ke arah dan bentuk yang lebih modern. Partai politik sering kali digambarkan sebagai institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern dan partai politik keberadaannya diatur dalam konstitusi negara. Dalam suatu negara yang menganut demokrasi maka, eksistensi partai politik merupakan suatu hal yang mutlak.

Keadaan yang demikian, menunjukkan bahwa fungsi partai politik sangatlah penting. Acap kali keberadaannya dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun partai politik bukanlah pelaksana dari suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan.

Saat ini, dapat dikatakan sangat sedikit negara yang mengabaikan relevansi partai politik dalam kehidupan demokrasinya. Hal ini dikarenakan, jika absennya partai politik dari kancah politik, maka akan menghadirkan dua kemungkinan (Almond dalam Mas'ood dan Mc Andrew, 2001). Pertama, sebuah negara akan dikuasai oleh rejim rejim dinasti tradisional. Pada negara seperti ini, kekuasaan negara di atas supermasi yang pencapaiannya bersifat akstriptif. Kedua, negara yang dikuasai oleh rezim rezim militer. Militer akan menjadi penguasa karena mereka adalah entitas modern yang

paling solid dan terorganisir sangat baik. Tidak hanya itu, militer memiliki kekerasan sebagai instrument untuk memaksakan kehendaknya. Pemerintahan tanpa artai adalah pemerintahan konservatif, sedangkan rezim anti partai merupakan rezim reaksioner (Huntington, 2004). Maka mau tidak mau, suka tidak suka negara demokrasi membutuhkan partai politik sebagai penyangga pilar demokrasi.

Di negara-negara maju, ukuran keberhasilan demokrasi secara tepat dapat dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan fungsinya untuk memasukan agenda-agenda kebijakan public yang bermanfaat, tidak saja bagi konstituen pemilihnya, melainkan juga bermanfaat seluruh komponen bangsa yang ada. Ukuran demokratis, misalnya dapat dilihat dalam kerangka apakah aspirasi konstituen sebagaimana yang disampaikan dalam janji-janji partai politik terwujud dalam implementasinya. Dalam studi Klingemann, Hofferbert, dan Budge dalam partai, kebijakan dan demokrasi (2000) menunjukkan bahwa di negara negara yang maju secara ekonomi maupun politik ditandai dengan perhatian serius dari partai politik untuk mewujudkan janji janji politiknya pasca partai tersebut memenangkan sebuah pemilihan. Dengan demikian keberadaan dan kinerja partai politik dalam menjalankan fungsinya menjadilah sangat penting dalam sebuah negara yang menganut nilai demokrasi.

Jika kita melihat pada keadaan partai politik di Indonesia dewasa ini, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah

ada di negara tercinta Indonesia ini partai politik? Apakah kita melakukan kesalahan dalam mengartikan serta memaknai bahwa apa sesuatu yang kita sebut sebagai "partai politik" selama ini bukan lah partai politik? Kalau memanglah ternyata itu partai politik, apa perannya?, fungsi apa yang dilakukannya?, serta bagaimana kinerjanya?.

Tulisan ini bertujuan untuk menelisik mengenai keberadaan partai politik di Indonesia dengan melihat dari peran dan fungsi yang dilakukan oleh sesuatu yang kita sebut partai politik itu apakah sesuatu

B. PEMBAHASAN

B.1. Cerita Partai Politik Dan Keluh Kesah Masyarakat Di Indonesia Pasca Soeharto

Partai politik pasca Soeharto kurang lebih memiliki corak yang sama dengan partai politik pada awal kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Orde Lama. Oleh sebab itu, akan sedikit mendeskripsikan mengenai partai politik di masa pemerintahan Soekarno. Pada periode awal kemerdekaan, dimunculkan regulasi tentang partai politik sehingga mendorong munculnya beragam partai politik, baik dari segi jumlah maupun corak politiknya. ideology menjadi dasar pembentukan berbagai partai politik saat ini. Secara umum ideology pada periode 1945 sampai 1965 dapat dikategorikan seperti yang disampaikan Feith dan Castles bahwa terdapat 5 aliran politik yaitu, nasionalisme radikal diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), selanjutnya tradisionalisme Jawa, berpusat dari Partai Indonesia Raya (PIR), sedangkan aliran Islam menggambarkan Partai Masyumi dan NU, kemudian sosialisme demokrat dapat dilihat pada Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS), dan aliran yang terakhir adalah aliran komunisme menunjuk pada partai komunis Indonesia (PKI). Kemudian partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang seluas luasnya bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai periode Orde Baru pada pemilihan umum 1971 yang pada saat itu diikuti oleh 8 partai dan setelah itu juga Soeharto membatasi gerak gerik dunia politik dan

tersebut menjalankan peran dan fungsi dari partai politik. Metode pengumpulan data yaitu dengan desk studi. tulisan ini akan terdiri dari lima bagian. Bagian pertama pengantar. Bagian kedua membicarakan sekilas mengenai partai politik dan kegelisahan masyarakat yang ditimbulkan dari partai politik di Indonesia. Bagian ketiga tentang arti penting partai politik, kemudian pada bagian keempat membicarakan mengenai fungsi partai politik yang ideal dan yang dipraktikkan. Terakhir bagian kelima adalah penutup.

mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi yang berdasarkan kemiripan ideology.

Namun ketika rezim Orde Baru ditumbangkan maka secara legal formal, babak baru perjalanan sejarah bangsa Indonesia ketika Soeharto dipaksa turun dari kursi kepresidenan. Rezim Orde baru yang berhasil mengontrol aktivitas serta membatasi ideology partai politik, akhirnya ditumbangkan oleh angin besar yang disebut reformasi, dan secara otomatis reformasi mengambil alih kekuasaan Orde Baru. Dimana terdapatnya kebebasan setelah 32 tahun dikerangkeng oleh sang penguasa. Moment tersebut dengan serta merta membangkitkan harapan lama akan terciptanya tatanan demokratis di Indonesia. Aroma demokrasi dalam reformasi menjadi semakin tajam sehingga menimbulkan antusiasme warga negara membentuk partai politik sebagai bentuk ekspresi perayaan kebebasan berserikat dan mengusung ideology masing masing, seperti yang diketahui bahwa substansi sebuah partai politik adalah sebuah lembaga yang didirikan atas suatu kehendak dengan ideologi yang mendasari dibentuknya sebuah parpol. Sehingga yang membedakan antara partai politik yang satu dengan yang lain adalah konsep ideologis atau platform partai. Masing-masing parpol memiliki konsep khas, yang berbeda dengan partai politik lainnya, mereka yang memiliki cara pandang yang sama, konsep ideologis yang sama, bergabung dalam satu partai politik tertentu. Hampir semua aliran ideology yang pernah ada pada masa orde lama kecuali komunis, hadir lagi pada masa

reformasi. Keadaan ini juga dapat dibaca sebagai bentuk protes sekalipun aksi balas dendam dari warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara yang besar ini karena selama Soeharto berkuasa, selama puluhan tahun itu pula rakyat diasingkan dari kehidupan politik.

Dalam situasi masih labil, pembentukan partai politik dijamin oleh Undang Undang No 2 Tahun 1999 yang isinya tidak lain mengenai pemberian kebebasan untuk membentuk partai politik dan memberikan kepastian hukum akan kelangsungan hidup, dan secara administratif tidak dipersulit. Bagaikan jamur di musim hujan, partai politik tumbuh sangat banyak bahkan berjumlah ratusan, dapat dilihat pada pemilihan umum pertama setelah runtuhnya kerajaan Soeharto. Pada tahun 1999 bahwa terdapatnya 148 partai politik terbentuk, yang mendaftarkan diri di Departemen Kehakiman dan HAM dan hanya 141 partai politik yang mendapatkan pengesahan, namun dikarenakan syarat yang ditetapkan untuk pembentukan partai relative mudah. Adanya persyaratan dan verifikasi berdampak bahwa dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai politik yang dinyatakan lolos kualifikasi dan menjadi kontestan untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 tersebut. Dari hasil pemilihan umum tersebut diketahui bahwa hanya 21 partai politik saja yang mendapatkan kursi di parlemen.

Diadopsinya system multi partai dengan multi ideologi paling tidaknya memunculkan tiga kekuatan utama pada pemilihan umum 1999, yakni nasionalis sekuler, nasionalis radikal, dan nasionalis agama. Era keterbukaan kedua setelah pada tahun 1955, memaksa munculnya polarisasi kekuatan politik. Nasionalis sekuler bisa diwakili oleh PDIP dan Partai Golkar, nasionalis radikal oleh PRD, dan nasionalis agama diwakili PPP, dan PBB.

Ketika kemeriahan pemilihan umum 1999 telah berlalu. Partai partai besar kembali berfikir menghadapi pemilihan umum 2004 yang masih menganut kebijakan multi partai. Namun yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan keinginan masing masing partai. Sebagai partai lama, minimal peserta pemilihan umum 1999, soliditas internal seharusnya dipertahankan

malah tidak terwujud. Hampir semua partai besar mengalami konflik internal, sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Agaknya peristiwa perpecahan dalam partai politik merupakan hal yang dianggap biasa. Demikian pula dengan partai partai lainya yang akan meghadapi pemilihan umum 2004. Mereka (baca: partai politik) harus dihadapkan dengan gesekan politik yang terjadi dalam parlemen antar partai politik, di sisi lain partai politik juga dipusingkan oleh persiapan memenangkan pemilihan tahun 2004.

Bukan hanya itu saja, jika dilihat dari sisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan terdapatnya kecenderungan atas hasil pemilihan umum 1999 bahwa masyarakat masih ragu dengan partai partai politik yang ada terutama yang mendapatkan kursi di legislatif akan memenuhi komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ketika mereka (baca: partai politik) mulai menempati kursi masing masing ketika pemilihan umum telah berakhir. Masyarakat umumnya juga menilai bahwa pemilihan umum pertama setelah rezim orde baru, hasilnya tidak memuaskan.

Sejak jatuhnya tampuk kekuasaan Soeharto Pemilihan umum kedua pada tahun 2004, dari berbagai sumber diketahui bahwa antusias warga negara semakin bertambah karena dipicu oleh ketidakpuasan dalam pemerintahan sebelumnya. Terdapat 237 partai politik yang mendaftar ke Departemen hukum dan HAM, namun dari dua ratusan partai politik tersebut hanya 50 diantaranya yang berbadan hukum dari departemen hukum dan HAM tersebut. berkat adanya persyaratan dan kualifikasi tertentu hanya 24 partai politik saja yang berasal dari berbagai latar belakang politik dan ideologi menjadi peserta pada pemilihan umum saat itu.

Pada pemilihan umum 2004, juga menunjukkan adanya konfigurasi yang dapat dikatakan relative sama dengan pemilihan umum masa orde lama. Ideology politik yang beragam mulai mengemuka, berbagai kekuatan politik dan gerakan civil society bersama sama membentuk partai politik.

Partai politik baru menawarkan sebuah visi baru dan saling bersaing dengan partai politik lama yang jauh lebih mapan. Pada saat itu pun berbagai partai baru bermunculan. Baik partai politik lama atau partai politik yang baru saling berebut peluang agar bisa memenangkan persaingan. Alhasil, partai politik baru seperti partai democrat mampu menarik banyak simpati dikalangan masyarakat, selain yang sudah pasti dan mapan seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB.

Selanjutnya melihat cerita dinamika partai politik pada pemilihan umum 2009 yang sedikit memiliki corak yang berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Mengapa demikian? Karena ini disebabkan oleh tantangan yang dihadapi oleh partai politik semakin kompleks. Ketidakpercayaan dari rakyat kepada partai politik semakin tinggi. Situasi tersebut membuat partai politik melakukan pergeseran yang signifikan terhadap pegangan ideology mereka (baca : partai politik) demi kepentingan pragmatis semata.

Pada tahun 2009 tersebut bisa jadi sebagai signifier bahwa politik aliran runtuh. Semakin tidak jelasnya identitas ideology partai politik maupun pilihan dalam menentukan partai mana yang akan diajak berkoalisi. Ideology hanya menjadi aksesoris yang diletak di depan, bahkan disembunyikan. Tidak bisa menunjuk secara jelas bahwa partai A memiliki ideology A dan juga tidak bisa dibedakan antara partai politik A dengan partai politik B serta memiliki kesamaan program misalnya saja Partai Democrat dan Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan umum 2009 yang sama sama memiliki program memperkuat kredit UMKM hanya redaksi penyampaiannya saja yang berbeda, kondisi ini memberikan gambaran bahwa partai politik saat ini mengalami kemelorotan ideology. Semua partai cenderung menjadi partai *catch all* yang dikelola berdasarkan mood mayoritas rakyat termasuk rasionalitas yang dimiliki oleh rakyat. Misalnya jika partai beraliran islam, menjual wacana ideology islam untuk saat ini tentunya tidak akan laris. Maka dari itu saat ini banyak partai yang sangat pragmatis hanya untuk merangkul lebih banyak pemilih dengan bentangan sayap

yang lebih luas, partai dengan senang hati menggeser ideologinya.

Pada pemilihan umum ketiga setelah lengsernya Soeharto, 55 partai politik tersingkirkan karena kualifikasi yang tidak terpenuhi dan hanya terdapat 38 partai nasional beserta 6 partai local yang bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Kehadiran partai baru tidak dapat dipungkiri yang turut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik menjelang pemilihan umum bisa jadi banyak partai-partai baru yang muncul sebagai refleksi nyata dari ketidakstabilan iklim politik Indonesia saat ini. Saat itu partai baru yang berhak ikut sebanyak 18 partai. Hasil dari pemilihan umum tersebut hanya 9 partai politik yang masuk dalam parlemen yang nantinya akan memperjuangkan kepentingan rakyat yang dititipkan kepada mereka.

Diketahui bahwa partai politik yang didirikan untuk melepaskan diri dari keterkungkungan, ketidakbebasan, ketidakadilan dan kemiskinan yang dihasilkan dari masa lalu yang dialami oleh banyak rakyat Indonesia. Sebagai kekuatan politik, partai memiliki sejumlah fungsi yang diharapkan oleh rakyat akan konsistennya menjalankan fungsinya tersebut sehingga keberadaan partai politik ada dan hadir ditengah kehidupan masyarakat dan menjadi bermanfaat. Terus menerus memperbaiki kinerja dengan mengoptimalkan peran dan fungsi maka akan menuntun menuju partai politik yang demokratis dan itu merupakan salah satu cara melepaskan diri dari belenggu masalah yang dihadapi oleh negara ini. Namun semua itu hanyalah idealitas belaka saja. Memang sepek terjang partai politik selalu berkoar koar dengan mengatasnamakan rakyat namun jika di cek dalam prakteknya justru bukan itu, rakyat hanya dijadikan kedok saja. Belasan tahun reformasi, selama itu pula partai politik hanya dijadikan kendaraan politik bagi para elit partai dengan tujuan mendapatkan kekuasaan, dan hanya sedikit sekali memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Partai politik hanya stagnan.

Tidak mengherankan kekecewaan rakyat atas partai politik yang berada dalam lingkup kekuasaan. Bukannya memperjuangkan kepentingan rakyat dan membebaskan dari belenggu

permasalahan, partai politik malah melakukan korupsi dan membuat permasalahan baru yang sesungguhnya sesuatu yang tidak terbayangkan ketika reformasi politik di sebarluaskan. Saat ini partai politiklah yang menjadi aktor utama penyebab menjadi trendnya korupsi di negara yang kaya tapi miskin ini. Lihat saja partai politik yang dulunya pada saat berkampanye katakan tidak pada korupsi, tapi tanpa rasa bersalah telah mengingkari komitmennya saat ini malah terjerumus dalam permainan uang dan lingkaran setan korupsi. Maka dari itu, tidak mengejutkan jika banyak pendapat bahwa partai politik yang berkuasa hanya ajang untuk mengeruk keuntungan. Janji janji yang pada masa kampanye hanya nyanyian menyentuh hati yang dinyanyikan dengan suara merdu tanpa pedengarnya tahu bahwa itu hanya nyanyian yang sedikit atau jarang sekali yang nyata dan keadaan yang seperti itu menggeret partai politik menjadi institusi demokrasi yang paling tidak dipercaya.

Kacang lupa kulitnya merupakan idiom yang menggambarkan kesan yang diambil oleh rakyat yaitu partai lupa dengan konstituennya ketika telah mendapat kursi kekuasaan dan hanya sibuk untuk kepentingan pribadi dan partainya, Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara namun tidak dijalankan, serta dalam perkembangannya partai politik hanya tampak sebagai mesin pendulang suara pada saat pemilihan umum, dengan kata lain partai politik hanya alat pencapai kekuasaan dan menumpuk kekayaan dari pada fungsi yang secara hakiki ada dan melekat pada partai politik itu sendiri.

Berpijak dari cerita yang dipaparkan diatas membuka jalan analisis mengenai keberadaan partai politik di Indonesia. Namun sebelum masuk pada analisa yang lebih lanjut maka adanya kebutuhan untuk mengetahui arti pentingnya partai politik di kehidupan negara yang demokrasi. Maka dari itu sub bagian berikut ini akan membahas arti pentingnya partai politik.

B.2. Mengapa harus ada partai politik?

Mengapa harus ada partai politik? pertanyaan yang dimunculkan oleh

masyarakat yang dipicu oleh perasaan tidak simpati dengan keberadaan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan mereka (baca : masyarakat). Pada bagian ini akan mengemukakan arti penting partai politik untuk menjawab pertanyaan dari yang kegelisahan tersebut.

Meminjam istilah pengamat politik Ari Dwipayana yang menyebutkan partai politik sebagai “setan yang diperlukan” diperlukan namun paling tidak disukai. Dan itu memanglah adanya dibuktikan oleh tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini rendah dikarenakan saat ini partai politik tempat pejabat bertransformasi menjadi penjahat lihat saja partai penguasa saat ini. Namun partai politik itu dibutuhkan demi kelangsungan berdemokrasinya negara ini dan partai politik diyakini sebagai instrument yang strategis terkait dengan perkembangan demokrasi di indoneisa di masa depan. Prakteknya partai politik di Indonesia tidak semanis pengertiannya seperti yang disampaikan Lili Romlan (2003) dalam bukunya yang mengutip Longman yang mengatakan bahwa partai politik merupakan media rakyat untuk mengartikulasikan dan mengaktualisasikan kepentingan dan aspirasinya dari waktu ke waktu. Dan juga tidak seelok yang diutarakan undang undang mengenai partai politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Macridis (1988) mengatakan bahwa didalam masyarakat modern partai politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Partai politik sebagai suatu asosiasi politik yang mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu dan melakukan pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin. Partai politik secara otomatis menjadi suatu instrument penting untuk memobilisasi masyarakat ke dalam kekuasaan negara.

Macridis juga mengatakan bahwa tidak ada satupun system politik yang berlangsung tanpa partai politik.

Berdasarkan *Institute for Multiparty Democracy* (2006) mengatakan bahwa partai politik dibutuhkan karena Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemetintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis. Seperti yang telah disinggung pada sub bagian pertama bahwa partai politik penting agar terhindar dari negara yang dikuasai oleh rezim dinasti tradisional dan juga dan rezim militer. Namun ini bukan berbicara mengenai keberadaan secara fisik. Koirudin (2004) dalam tulisannya mengatakan sebagaimana salah satu prasyarat dari terwujudnya demokrasi adalah adanya partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan sebagai media untuk melakukan bargaining kebijakan dengan negara (baca: pemerintah). Dari apa yang disampaikan oleh Koirudin tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah negara yang bercorak demokrasi penting adanya partai politik namun keberadaannya tidak dilihat dalam wujud fisiknya, yang menjadi penting adalah fungsi yang dijalankan oleh partai politik tersebut. Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dan maka dari itu perlu adanya partai politik di Negara ini.

B.3. Partai Politik dan Fungsinya Antara Normative dan Realitas

Setelah diketahui bahwa partai politik menjadi penting keberadaannya yang bukan dalam wujud fisiknya melainkan dari bagaimana ia (baca: partai politik) menjalankan fungsinya agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat selain melaksanakan fungsi konvensionalnya. Singkat kata keberadaan partai politik diukur dengan bagaimana ia menjalankan fungsi yang telah diembannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan entitas yang dilahirkan untuk merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Partai politik adalah mesin untuk mendapatkan

kekuasaan tersebut. namun dibalik itu semua tidak akan ada artinya tanpa legitimasi dari pendukungnya. Jadi partai politik agar dapat mencapai tujuannya membutuhkan serangkaian cara untuk melancarkan aksinya dengan “mendekati” masyarakat. Maka dari itu selain takdir berburu kekuasaan, lebih dari itu, partai politik memiliki sepaket fungsi yang harus dilakoni agar ia (baca: partai politik) agar mendapatkan dukungan dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai bentuk manufer taktis partai politik.

Sejak bergulirnya kepemimpinan Soeharto dan dilaksanakan pemilihan umum pada 1999 hingga saat ini, dapat dikatakan tidak terasanya keberadaan partai politik karena memang sejak 1999 sampai sekarang tidak ada capaian yang terlihat dari partai politik yang menyebabkan kekecewaan terhadap harapan awal adanya reformasi dan berdemokrasi, terlebih lagi partai politik bukan memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat malahan memberikan permasalahan baru. Sebagai permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat sepertinya telah terlupakan dan partai politik seakan akan mengingkari masyarakat yang telah dijanjikan dan diberikan harapan namun ternyata semuanya palsu. Maka dari itu, menjadi suatu kebutuhan untuk melihat apakah partai politik menjalankan fungsinya sebagai partai politik sehingga keberadaannya terdeteksi oleh masyarakat.

Begitu banyak pendapat mengenai fungsi partai politik, jika diteropong berdasarkan Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 maka dapat diketahui fungsi dari Partai Politik pada pasal 11, partai politik antara lain sebagai Sarana (1) Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Penciptaan Iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur Aspirasi Politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) Partisipasi Politik warga negara

Indonesia, dan (5) Rekrutmen Politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara umum partai politik dibanyak literatur mengenai partai politik bahwa terdapatnya lima fungsi dijalankan, dan sekaligus melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi yang dipangkunnya antara lain fungsi sosialisasi politik, fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi rekrutmen politik dan terakhir fungsi komunikasi politik. Sertiap fungsi dari partai politik saling berkaitan dan tumpang tindih. Untuk melihat fungsi yang dijalankan partai politik dimulai dari:

1. Fungsi sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat dengan cara memperkenalkan nilai nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku dalam suatu negara. Serta fungsi ini merupakan manifestasi partai politik untuk menanamkan nilainya (baca : partai politik) seperti ideology, visi dan program pada masyarakat agar masyarakat dapat mengidentifikasi dirinya terhadap partai tersebut sehingga fungsi ini merupakan fungsi awal untuk memobilisasi dukungan seluas mungkin.

Namun, untuk membuat seseorang memiliki rasa kedekatan terhadap suatu partai politik bukanlah perkara gampang. Kata kunci dari fungsi ini yaitu pembentukan sikap, dari kata kunci ini dapat diketahui bahwa akan membutuhkan waktu yang tidak cukup hanya sehari, sebulan, atau setahun namun waktu yang akan dihabiskan akan lebih panjang, juga membutuhkan keintensn dari proses yang berlangsung tanpa henti. Maka dari itu, partai politik bekerja ekstra keras untuk menjalankan fungsi pertama ini. Peran mesin partai yang berada di tingkatan paling bawah harus bergerak jauh jauh hari sebelum datangnya pemilihan umum. Ada banyak cara yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan starting step untuk mendapatkan dukungan.

Praktek dilapangan yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya hanya sebatas pada saat pemilihan umum akan dilangsungkan saja dengan waktu yang singkat ini terlihat dengan terdapatnya trend penurunan partai ID di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini. Namun pada awal reformasi dan pemilihan umum pertama sosialisasi yang dilakukan sangat masif dan masih berakar pada grasstoot namun seiring perkembangan zaman dengan munculnya gaya amerika dalam mensosialisasikan politik pada 2004 serta didukung oleh preforma dari pada partai politik sosialisasi politik hanya sekedar sosialisasi yang tidak mampu ditancapkan dalam diri masyarakat oleh partai politik sehingga target dari pembentukan nilai tersebut tidak tercapai. Berdasarkan temuan lembaga survey Indonesia pada awalnya dalam pemilihan umum pertama sejak Suharto dilengserkan, diketahui bahwa 86 % masyarakat mengaku memiliki identitas partai terkait dengan massa pemilu dan mobilisasi massa yang intensif oleh partai politik dengan melakukan sosialisasi politik, dan masyarakat optimis dan menumpahkan harapan kepada partai politik, tetapi kemudian, dimata pemilih partai politik hanya tinggal harapan saja karena partai politik tidak bisa berbuat sebanyak yang masyarakat harapkan, dan sampai tahun 2009 kecenderungan luntarnya identifikasi partai semakin merosot jatuh pada 20%.

Dewasa ini sosialisasi politik yang dilakukan partai politik ini layaknya seseorang mencari popularitas saja untuk kebutuhan pragmatis sehingga kaidah dari apa itu sosialisasi politik menjadi bergeser. Sosialisasi politik menjadi sangat mahal, diindikasi oleh adopsi gaya amerika kedalam tubuh partai politik untuk melakukan sosialisasi. Misalnya saja penggunaan media seperti televisi, radio, surat kabar, poster, baliho, banner dan lain sebagainya, aktifitas sosialisasi tersebut memang sedikit efektif untuk mengenalkan partai politik.

Tapi aktifitas itu tidak mampu membentuk ikatan emosional antara partai politik dengan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi politik belakangan ini menunjukkan bahwa partai politik hanya melakukan sosialisasi pada detik detik menjelang masa kampanye karena ada kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat namun ketika kepentingan itu terpenuhi dan itu merupakan suatu pertanda bahwa sosialisasi politik yang dilakukan partai politik berhenti. Sosialisasi politik hanya berjalan beberapa bulan saja. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa keberadaan partai politik jika dilihat dari fungsi ini hanya ada beberapa bulan saja menjelang hari H pemilihan umum dilangsungkan.

2. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Seperti yang diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu saluran penting dalam mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan public. Maka untuk melihat keberadaan partai politik dapat diketahui dengan melihat fungsi partai politik yaitu artikulasi kepentingan. Untuk fungsi kedua ini bisa dibilang merupakan fungsi partai politik ketika telah berada dalam parlemen. Ramlan surbakti mengatakan bahwa fungsi artikulasi kepentingan ini merupakan suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Maka dari itu partai politik disebut sebagai kelompok kepentingan institusional yang berfungsi untuk mengartikulasi kepentingan seperti yang grabiel almond kelompokkan. partai politik menampung keinginan, aspirasi harapan dan kemauan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan agar dapat dijadikan kebijakan.

Namun semua itu hanya kondisi ideal saja. Jika dilihat pada kenyataannya maka Fungsi ini pun tidak dirasakan oleh publik. Partai

politik dianggap gagal dalam mengartikulasikan kepentingan mereka ditunjukkan dengan 67,4 persen mengatakan partai politik tidak menjalankan fungsi yang satu ini. Ketidakmampuan partai politik dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat membuat fungsi partai dalam mengagregasi kepentingan ikut mandek dan imbasnya kebijakan yang dikeluarkan bukan lah kepentingan dari masyarakat. Tentunya akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat.

3. Fungsi agragasi kepentingan

Salah satu fungsi mendasar dari partai politik adalah mengagregasikan kepentingan masyarakat dengan mengubah atau mengkonversikan tuntutan tuntutan menjadi alternative alternative kebijakan kebijakan. Alternatif kebijakan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah di artikulasikan dari masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan dan kemudian diakomodasikan, lalu dikombinasikan dan selanjutnya dikompromikan. Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artikulasi kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah partai politik dan birokrasi. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi individu-individu yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi agregasi kepentingan.

Sejatinya, kegiatan atau fungsi ini memberikan jalan untuk membuat dan pengambilan kebijakan yang paling tepat untuk masyarakat. namun jika dilihat fungsi agregasi yang dimiliki Partai politik di legislatif tidak berjalan maksimal. Dalam konteks local, Ini salah satu faktor yang menyebabkan Peraturan daerah yang dibuat tidak

efektif. Partai politik sangat mempengaruhi dan membentuk kebijakan yang akan dirumuskan. Namun selama ini banyak peraturan daerah yang dirumuskan bukannya menjawab dari kepentingan yang diartikulasikan dan telah diakomodasi malahan kebijakan yang dikeluarkan hanya memberikan keuntungan bagi segelintir elit. Para wakil rakyat yang berasal dari partai politik ini belum bekerja secara maksimal akibatnya banyak Perda yang muncul menimbulkan kerancuan dan membebani masyarakat.

4. Fungsi rekrutmen politik

Fungsi partai politik selanjutnya yaitu fungsi rekrutmen dimana partai politik melakukan penyeleksian seseorang atau sekelompok orang untuk dapat melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik dan pemerintahan. Ini merupakan sarana bagi partai politik untuk mempersiapkan dan melatih kader partai politik untuk maju menjadi calon pemimpin bangsa. Partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat.

Bagaimana partai politik yang ada mampu menyediakan kader kadernya yang berkualitas untuk duduk dilembaga legislative dan eksekutif karena partai politik lah produsennya. Maka dari itu system perekrutan yang baik dibutuhkan oleh setiap partai politik. Adapun system perekrutan antara lain yaitu dengan proses seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota dari partai yang bersangkutan. Dengan demikian tidak akan sembarangan seseorang secara otomatis memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (baca : anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu

berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa dan negara.

Namun faktanya perekrutan politik di Indonesia sangat buruk. Tidak semua partai politik memiliki pola rekrutmen yang baik, namun diantara yang tidak baik masih ada partai yang memiliki pola rekrutmen yang baik seperti Partai Golkar dan PKS. Dalam hal pencalegan rekrutmen yang partai politik dilakukan dengan model elitis-oligarkis yang sangat tidak demokratis dan juga akan melestarikan praktek KKN yang tertutup serta tidak partisipatif. Keadaan ini nantinya akan menimbulkan rendahnya akuntabilitas dan responsiveness terhadap pemilihnya.

Bukan hanya itu, partai politik terkesan hanya mementingkan bagaimana mendulang suara yang banyak dengan menggunakan popularitas seseorang terutama artis. Dengan sangat pragmatis fenomena kader instanpun terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilihan umum 2009 dari 672 caleg sekitar 5 % merupakan artis nasional yang sangat dikenal oleh public. Untuk menghadapi pemilihan umum 2014 PAN masih menempatkan artis dalam DCS untuk 2014. Bukan hanya PAN saja namun PDIP juga menempatkan beberapa nama artis dalam DCS untuk pemilihan umum 2014. Cara lain untuk melakukan rekrutmen oleh partai politik terutama untuk memenuhi quota 30% perempuan dengan memasang iklan di dunia maya (baca: melalui internet) dan juga disurat kabar. Untuk pemilihan umum 2014, satu satunya partai politik baru yang lolos yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM), melakukan cara yang bisa dibilang berani dengan secara terbuka menawarkan "modal" antara Rp 5 – 10 miliar untuk caleg yang akan maju dalam pemilihan umum.

Dari paparan mengenai kelakuan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen menunjukkan bahwa pola rekrutmen partai politik belum menunjukkan perubahan. Dimana partai politik hanya mencari suara bukan calon legislative

yang berkualitas yang nantinya akan mengartikulasikan dan melakukan agregasi kepentingan masyarakat. dan ini mengisyaratkan bahwa partai politik kekuarangan kader internal dan ini dapat diartikan sebagai bentuk kegagalan kaderisasi yang dilakukan partai politik.

Permasalahan yang dihasilkan oleh kegagalan melaksanakan fungsi rekrutmen yang dilakukan partai politik, secara langsung akan berdampak pada kinerja yang legislative dan tanpa terkecuali eksekutif. Jika diperhatikan partai politik belum memiliki apa yang disebut dengan standar ataupun prosedur dalam menentukan kadernya yang akan diterjunkan kedalam pertarungan mendapatkan kursi dan jabatan public. Dengan demikian secara otomatis nantinya kader dari partai politik yang mendapatkan kekuasaan belum tentu telah memenuhi standar. Partai politik tentunya haruslah sadar akan arti penting dari fungsi ini dan nantinya akan secara langsung berimbas pada partai politik tersebut. maka dari itu partai politik perlu membenahi pola rekrutmen dengan tujuan menciptakan wakil yang benar benar mampu melakukan fungsi lainnya yang telah dibawa diatas pundaknya.

Apa yang dilakukan oleh partai politik terutama dalam menjalankan fungsi rekrutmen beberapa belakangan ini bisa dikatakan hanya untuk mendapatkan dukungan saja tanpa melihat kualifikasi standar yang dibutuhkan untuk mampu menjalankan tugas berat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan kepentingan masyarakat dan memecahkan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat.

5. Fungsi komunikasi politik

Fungsi yang terakhir yaitu Fungsi Komunikasi Politik. Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat

dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

Partai politik merupakan tempat yang telah dititipkan oleh masyarakat untuk menitipkan dan menyepakati sikap politik tertentu dalam pembuatan kebijakan. Jika melihat dalam konteks Indonesia, maka apa yang telah diungkap sebelumnya hanyalah sebuah angan angan saja. Mana ada partai politik melakukan komunikasi politik pada hari hari biasa bukan menjelang pemilihan untuk menyampaikan kebijakan yang telah diterbitkan berdasarkan kepentingan yang disampaikan kepada partai politik dan diartikulasikan serta diagregasikan oleh partai politik. Jika seandainya masih terdapat komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik, itupun dikatakan bukan komunikasi karena hanya terjadi satu arah dari partai politik ke masyarakat. seperti yang dilakukan oleh PPP di Jepara yang melakukan komunikasi politik lebih dalam media pengajian dan komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Partai politik akan lebih massif dan intens berkomunikasi dengan masyarakat ketika menjelang pemilihan dan ini benar benar hanya komunikasi sesaat yang ditujukan untuk kepentingan mereka (baca: partai politik).

Melihat dari apa yang seharusnya dan yang terjadi berdasarkan fungsi partai politik, bisa dikatakan bahwa hampir keseluruhan fungsi yang diemban partai politik saat ini tidak berjalan dengan baik. Energy partai politik hanya terpusat pada upaya meraih kekuasaan dari pada

memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Kekecewaan masyarakat terhadap partai politik bukan hanya cerita belaka namun kekecewaan itu hadir ketika melihat kinerja partai politik yang belum memadai dan harapan yang besar dulunya diletakkan pada partai politik hanya tinggal harapan.

C. PENUTUP

Partai politik yang tumbuh dan berkembang pasca pemerintahan Soeharto tidak jauh lebih baik ketimbang partai politik pada masa sebelumnya. Saat ini keberadaan partai politik bisa dibilang tidak diketahui bukan secara fisik namun bagaimana fungsi yang diembannya sebagai partai politik. Berbagai fungsi normative tidak sedikit yang terbengkalai, hal ini tentulah disebabkan oleh ketidak siapan partai politik menghadapi perubahan yang cepat. Dan alhasil partai politik hanya nama tanpa kinerja yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi. Alih alih memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat, namun keberadaan partai politik sendiri memberikan masalah yang menambah masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dimana semestinya partai politik memperjuangkan kepentingan masyarakat, atau paling tidak konstituennya, malah yang terjadi bukan lah seperti itu, partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan dan kekayaan meskipun tidak dipungkiri bahwa fungsi partai politik memang mencari kekuasaan minus kekayaan. Sementara itu persoalan lebih krusial yang melilit masyarakat dibiarkan begitu saja, seperti kemiskinan ketidakadilan dan sebagainya. Semua itu tampak tidak dihiraukan sama sekali dan

Jelas ini akan sangat memberikan kekecewaan kepada masyarakat karena telah menggantungkan harapan pada partai politik. Jika ini kondisinya berarti ada tidak adanya partai politik di Indonesia secara fisik tidak akan ada pengaruh dan manfaatnya bagi masyarakat karena hakekat dari pada keberadaan partai politik adalah fungsi yang dijalankannya.

terkesan lepas tangan. Padahal ketika kampanye di saat pemilihan umum yang selalu diumbar yaitu membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat seperti idiom tong kosong nyaring bunyinya. Selain itu partai politik dipandang hanya bekerja menjelang pemilihan umum dan seakan akan partai politik tertidur panjang antara dua pemilihan umum dan ini menyebabkan tidak terbangunnya hubungan yang kuat antara partai politik dan masyarakat umumnya dan konstituen sevara khusus.

Keyataan itu menyadarkan masyarakat bahwa mereka selama ini hanya dijadikan objek oleh partai politik yang bertujuan untuk mendulang suara saat pemilihan umum dengan memberikan janji janji manis. Namun setelah berkuasa, janji yang terucapkan itu kemudian diingkari. Sehingga tidak mengherankan kalau masyarakat beranggapan semua partai politik sama, tidak ada bedanya satu sama lain. Masyarakat hanya diperalat demi kelancaran tujuannya.

Dengan demikian, bagi masyarakat partai politik itu tidak ada hanya sekedar symbol dan atribut demokrasi. Partai politik hanya suatu organisasi yang muncul karena adanya negara modern dan partai politik keberadaannya hanya sebuah cerita belaka yang jauh dari kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmanzah. 2010. *Persaingan, legitimasi, dan marketing politik: pembelajaran politik pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Herbert faith dan lance castles. 1988. *Pemikiran politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Imam Hidajat. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Perss .
- Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Lili Romli, dkk. 2003. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: LIPI.
- Saiful munjani, William liddle, dan kusridho ambardi. 2012. *Kuasa rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Sigit pamungkas. 2011. *Partai politik : teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: IDW.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Very Junaidi, dkk. 2011. *Anomaly Keuangan Partai Politik : Pengaturan Dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan.